

SEJARAH PERKEMBANGAN DESA BUGIS - MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Oleh: Muhammad Zid dan Sofjan Sjaf
Dosen Jurusan Geografi FIS UNJ

Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya adalah bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan memerlukan upaya keras semua pihak terkait. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana kesejahteraan bisa dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Setiap daerah memiliki cara dan artikulasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tergantung kepada seberapa besar usaha pemimpin di wilayah tersebut. Rezim kepemimpinan dan pemimpin boleh datang silih berganti, satu hal yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemimpin adalah bagaimana era kepemimpinannya mampu memberdayakan sekaligus mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pergulatan menuju kesejahteraan di Sulawesi Selatan sesungguhnya dapat ditelusuri secara kultural-historis melalui penelusuran beberapa kasus atau kejadian yang kontekstual sebagai tonggak-tonggak kesejarahan. Sebagai ilustrasi bahwa munculnya gerakan "Ratu Adil" yang terwujud dalam

pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kahar Muzakar sejatinya merupakan reaksi ketidakpuasan rakyat terhadap hak-hak mereka untuk bisa hidup lebih baik (baca: sejahtera).

Tulisan ini mencoba menyikapi tiga hal. *Pertama*, bagaimana berlangsungnya pertarungan antar elit Bugis dan Makassar. *Kedua*, migrasi keluar Sulawesi Selatan sebagai bentuk "protes" dan "respon" terhadap kegagalan pemerintah Sulawesi Selatan permasalahan kesejahteraan pada aras lokal, *Ketiga*, pemberontakan DI/TII sebagai manifestasi atas ketidakberhasilan atau kegagalan negara mengelola keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kajian akan dibingkai melalui pemikiran dan pergulatan menuju kesejahteraan, khususnya dalam kerangka sejarah Sosiologi Orang Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Sejarah Orang Bugis dan Makassar: Perubahan Politik, Budaya dan Ekonomi di Sulawesi Selatan

Memahami dengan utuh kesejarahan orang Bugis dan Makassar dapat dilihat dari dinamika perubahan politik, budaya dan ekonomi yang berlangsung sepanjang tiga periodisasi penting di Sulawesi Selatan. Sesungguhnya ketiga periodisasi ini

sangat terkait erat dengan kejadian yang terjadi di Indonesia, kemudian termanifestasi dalam lingkup lokal di daerah-daerah. Bagian ini, akan mencoba menguraikan ketiga periodisasi penting sebagaimana yang dimaksud.

Pra Kolonial

Era pra kolonial bisa ditelusuri melalui naskah La Galigo (Pelras, 2006) yang banyak dijadikan acuan untuk mengkaji masyarakat dan budaya Bugis-Makassar. Meski demikian, naskah tersebut memiliki ciri khas epik yang cenderung melebih-lebihkan dan bersifat anakronis. Zaman La Galigo merupakan periode keemasan yang berkaitan dengan ekspansi perdagangan antarpulau dan internasional menyebabkan lahirnya berbagai kerajaan, seperti: Luwu, Cina, Soppeng, dan Suppa. Pada zaman tersebut, ada kesan bahwa para penguasa dinasti terkait satu sama lain melalui hubungan perkawinan dan persamaan ideologi mengenai asal-usul mereka.

Berkaitan dengan perubahan politik, budaya dan ekonomi pada periodisasi ini dapat dicermati pada abad 14 hingga abad 16. Abad ini memberikan gambaran tentang perubahan kehidupan sosial, politik, ekonomi di kawasan Sulawesi Selatan, yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi budidaya padi, dan perluasan wilayah berbagai kerajaan yang diikuti dengan pembukaan lahan besar-besaran dan pembangunan banyak pemukiman baru. Proses peralihan menuju kondisi baru - yang mungkin mulai terjadi pada abad ke-14 – berlangsung tidak selamanya mulus, berlangsung tersendat-sendat, diwarnai dengan konflik kepentingan yang

dikemas dalam bentuk persaingan antar bangsawan dari berbagai kerajaan. Akibat dari perubahan ini adalah lahirnya sistem piramida feodal yang didasarkan atas hubungan kontraktual antarsesama kerajaan utama dengan kerajaan bawahan, dan hubungan antarindividu (baca hubungan *patron-klien*).

Walau demikian, tak dapat dipungkiri bahwa hubungan struktural seperti ini, telah membuka kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan antara kaum bangsawan dan kalangan biasa sehingga melahirkan berbagai lapisan kebangsawanan. Konsekuensi lain adalah munculnya konflik antar bangsawan untuk menduduki berbagai jabatan politik yang terus terjadi, serta konflik antara kerajaan besar untuk saling menguasai. Keadaan ini tetap bertahan dan merupakan motif yang mendasari perkembangan kehidupan berbagai kerajaan dan politik di Sulawesi Selatan.

Dalam periodisasi ini, kejadian menarik untuk dicermati pada kurun waktu 1600 sampai dengan 1669. Kurun waktu ini ditandai dengan proses Islamisasi kerajaan besar di Sulawesi Selatan serta pertarungan dua kerajaan besar yaitu Goa (Makassar) dan Bone (Bugis) untuk menguasai semenanjung Sulawesi Selatan. Serangkaian kemenangan panjang yang diperoleh kerajaan Goa akhirnya dihentikan oleh kerajaan Bone dengan bantuan Belanda. Periode ini juga merupakan awal dominasi armada pelayaran Bugis, Makassar, dan Mandar di perairan Nusantara yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Kolonial

Awal abad ke-16, pelabuhan Makassar telah mempertukarkan beras,

bahan makanan, emas dengan tekstil Gujarat, Benggali, dan Coromandel. Kapal-kapal dari Makassar berlayar ke Jawa, Malaka, Kalimantan, dan Siam dan semua tempat di antara Pahang dan Siam. Satu setengah abad kemudian, sebelum penaklukan Belanda, Makassar sudah berkembang menjadi satu mata rantai perdagangan regional rempah-rempah Maluku dan hasil laut dan hutan. Makassar menjadi pelabuhan penting untuk mengapalkan berbagai komoditas dari wilayah Timur Kepulauan Indonesia. Komoditas penting seperti lilin, tempurung penyusut, budak belian, kayu cendana, diekspor ke berbagai negara melalui pelabuhan Makassar.

Abad 17-18 Makassar sebagai kota pelabuhan penting bagi Pemerintahan Hindia Belanda mengalami dinamika yang luar biasa dalam perdagangan dengan negara-negara lain. Makassar berkembang menjadi kota yang multi etnis dengan etnis utama Makassar, Bugis, Cina, Melayu atau peranakan yang kesemuanya memainkan peranan vital dalam sejarah Makassar, dan interaksi di antara mereka menciptakan identitasnya.

Abad ke-19 perdagangan Makassar mengalami kemajuan dan kegairahan sebagai pengaruh tidak langsung dari Inggris yang memberlakukan perdagangan bebas. Sistem perdagangan bebas menguntungkan para pelayar dan pedagang dari Makassar, Bugis, Mandar, Selayar, dan Buton. Sebaliknya, Pemerintah Hindia Belanda memandang Inggris sebagai ancaman, namun tidak berdaya membendung pengaruh Inggris karena Inggris lebih unggul dalam hal armada perdagangan maritim dan menguasai perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kondisi perekonomian negeri Belanda semakin terpuruk akibat perang dengan Inggris dan pendudukan Perancis, padahal Belanda belum berhasil menguasai sepenuhnya Kepulauan Hindia-Belanda; sebagian besar masih berstatus “kerajaan sekutu” yang sewaktu-waktu bisa membelot. Di sisi lain, Traktat London memaksa Belanda untuk menerapkan sistem perdagangan bebas serta melepaskan koloninya di Semenanjung Malaka dan harus mengakui kekuasaan Inggris di wilayah Melayu. Sebagai imbangannya, Inggris bersedia melepaskan Hindia Belanda dan mengakui kekuasaan Belanda atas kepulauan tersebut.

Sesuai perjanjian, Pemerintah Hindia Belanda harus menerapkan “politik pintu terbuka” sejumlah pelabuhannya bagi bangsa asing. Tetapi “politik pintu terbuka” mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh tujuh faktor. *Pertama*, pajak yang diberlakukan terlalu tinggi. *Kedua*, adanya larangan perdagangan senjata. Padahal senjata sangat diperlukan oleh kerajaan lokal, pedagang dan pelaut. *Ketiga*, adanya monopoli atas sejumlah komoditas yang diminta penduduk seperti candu dan minuman keras. *Keempat*, diterapkannya alat pembayaran berupa mata uang tembaga dan kertas. *Kelima*, pemerintah terlalu memusatkan diri pada komoditas yang laku di Eropa dan tidak memperhatikan mata dagangan penduduk yang laris di Cina, seperti berbagai hasil laut, sarang burung, kayu cendana. *Keenam*, kemerosotan perdagangan yang pada gilirannya memudarkan semangat untuk mengembangkan modal. *Ketujuh*, monopoli yang berlebihan atas komoditas produksi penduduk.

Pentingnya pelabuhan Makasar mulai tergeser oleh kota Pelabuhan Singapura yang dikuasai Inggris, kalahnya pemerintah Hindia Belanda bersaing dengan kongsi dagang Inggris mendorong Pemerintah Hindia Belanda menempuh beragam cara untuk memperkuat ekonomi dan politiknya melalui : *Pertama*, memperbanyak pemilikan kapal melalui kontrak kerjasama dengan perusahaan pelayaran. *Kedua*, memberi hak istimewa kepada perusahaan tertentu. *Ketiga*, melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan sekutu di Sulawesi selatan. Jelaslah bahwa Pemerintah Hindia Belanda menata perdagangan Makassar lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip merkantilisme ketimbang ekonomi liberal.

Kesulitan lain dalam hal menguasai Makassar-Bugis karena pengaruh agama Islam yang sudah sejak lama dianut kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan. Misalnya kerajaan Gowa-Tallo yang masuk Islam pada tahun 1605 dan membawa agama baru ini ke negara-negara lainnya. Pengaruh Gowa-Tallo sampai ke Sumbawa, Buton, dan hampir seluruh Nusa Tenggara. Sistem interaksi yang terbuka dengan dunia luar dan didasarkan pada pelbagai jaringan ekonomi, persekutuan politik dan keagamaan tidak mudah diambil alih oleh VOC yang memiliki tujuan dan pengetahuan lokal yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan VOC banyak menjalin kerjasama dengan elit politik dan pedagang lokal. Salah satu dukungan politis utama Belanda datang dari Aru Palakka.

Pasca Kolonial

Periodesasi ini ditandai dengan tiga peristiwa penting, yakni kekhawatiran

pemerintahan Indonesia, pemberontakan DI/TII dan rasionalisasi sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan. Peristiwa pertama ditandai dengan hadirnya berbagai permasalahan pelik, seperti: mempertahankan ketertiban masyarakat, perjudian yang kian merajalela, dan perlawanan anti Belanda yang sering dikemas dengan mengatasnamakan Ratu Adil bersama sekelompok kecil pengikutnya. Sesungguhnya peristiwa ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Belanda dan Jepang saat menjajah Sulawesi Selatan.

Saat Belanda menguasai Sulawesi Selatan, adanya kekhawatiran kampanye nasionalisme dan terbentuknya cabang-cabang pergerakan politik dan keagamaan yang berasal dari Jawa. Sejalan dengan itu, pada tahun 1918 di Makassar berdiri Partai Sarikat Islam (PSI) yang kemudian dirubah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). PSII merupakan partai nasionalis paling aktif dengan lima cabang, ditambah cabang kepemudaan dan kepanduan. Ketika PSII dilarang Belanda, anggotanya pindah ke Partai Indonesia Raya, yang kemudian juga menjadi partai terlarang. Selain itu tumbuh Persatuan Selebes Selatan dan Muhammadiyah yang lebih bergerak dalam bidang pendidikan dan pembaharuan sosial berdasarkan Islam. Para pemimpin Muhammadiyah umumnya kaum nasionalis serta anggotanya kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Seperti halnya dengan penguasaan Jepang, tidak banyak merubah struktur pemerintahan peninggalan Belanda di Sulawesi Selatan. Atau dengan kata lain,

tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Kondisi berbeda setelah Indonesia merdeka, kekhawatiran pemerintah tertuju pada tumbuhnya kelompok-kelompok grilya diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Makassar. Adalah Laskar Pejuang Revolusioner Indonesia se-Sulawesi (LAPRIS) dan Tentara Republik Indonesia untuk Persiapan Kemerdekaan Sulawesi (TRIPS) merupakan kelompok-kelompok grilya yang tumbuh karena hadirnya tentara KNIL Hindia Belanda di Sulawesi.

Inilah embrio pemberontakan DI/TII yang didalangi Kahar Muzakkar.¹ Sebelum terjadinya pemisahan Negara Indonesia Timur di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar, terjadi perbedaan pendapat di Jakarta mengenai posisi Kahar Muzakkar untuk menangani kaum pemberontak di wilayah Indonesia Timur yang menginginkan federalisme. Namun keinginan tersebut, ditolak mentah-mentah Kolonel Kawilarang dari Minahasa sebagai komandan wilayah Indonesia Timur yang ditunjuk pemerintah pusat. Kemudian Kolonel Kawilarang secara sepihak mengeluarkan dekrit pembubaran KGSS (Kelompok Gerilya Sulawesi Selatan). Penolakan inilah yang membuat Kahar Muzakkar marah dan selanjutnya bergabung dengan kelompok gerilya dan mulai memblokir jalan-jalan utama Sulawesi Selatan. Perseteruan Militer dengan kelompok Kahar Muzakar semakin meruncing sampai

¹ Kahar Muzakkar adalah salah satu pemuda yang melarikan diri ke Jawa untuk bergabung dengan para pejuang di Jawa. Sepak terjang Kahar Muzakkar ditandai dengan kemampuannya mengorganisir kelompok perjuangan yang dinamakan TRIPS.

terjadi kesepakatan sementara, para gerilyawan dilebur menjadi "Corps Tjadangan Nasional" (CTN) yang terdiri atas lima batalyon. Proses seleksi gerilyawan dianggap tidak adil oleh kelompok Kahar Muzakkar ditanggapi dengan cara perang gerilya dan mereka mendapat gelar "Tentara Hutan".

Awalnya ideologi gerakan Kahar Muzakar bercorak sosialisme Islam. Akan tetapi semenjak menerima tawaran Kartosuwiryo yang memimpin pemberontakan Darul Islam pada tahun 1952 di Jawa Barat untuk melawan pemerintahan Jakarta membuat gerakan Kahar Muzakkar semakin berorientasi Islam. Ini sangat dimungkinkan karena strategi Kahar Muzakkar untuk memperoleh dukungan atas aksinya. Meski demikian, aksi Kahar Muzakkar membuat penduduk pedesaan di Sulawesi Selatan dalam kondisi terjepit, mereka harus berhadapan dengan TNI pada siang hari dan gerilyawan Kahar Muzakkar pada malam hari. Jika tidak membantu TNI mereka dicap sebagai simpatisan pemberontak oleh pemerintah, dan mendapat hukuman dari tentara, sedang jika menolak DI, rumah mereka akan dibakar. Persoalan yang sangat dilematis bagi rakyat Sulawesi Selatan!

Kondisi ini, kemudian mendorong pemerintah pusat untuk melakukan negosiasi. Adapun negosiasi yang ditawarkan adalah pemberian amnesti dan "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi" kepada pengikut Kahar Muzakkar dan kenyataannya mendapat respon positif oleh kebanyakan anak buah Kahar Muzakkar. Kondisi ini memperkuat posisi pemerintah pusat dan sebaliknya, semakin mempersempit ruang gerak Darul Islam. Lemahnya posisi kekuatan gerilyawan Kahar Muzakkar semakin parah ketika Bahar Mattalioe sebagai

wakil komandan pasukan Kahar Muzakkar menyerahkan diri. Sejak tahun 1960, kekuatan para pemberontak jauh melemah, kecuali di daerah pegunungan sekitar Gunung Latimojong di Luwu dan di sekitar Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1961, terjadi perundingan antara Jenderal Yusuf dan Kahar Muzakkar yang hampir membuahkan kesepakatan; sayang pertikaian tetap berlanjut setelahnya. Akhirnya, sisa-sisa pasukan TII dipaksa mundur ke Sulawesi Tenggara, di mana pada tanggal 1 Februari 1965 Kahar Muzakkar ditemukan di tempat persembunyiannya dan ditembak mati. Ini akhir dari pemberontakan besar yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan.

Persitiwa ketiga adalah "rasionalisasi" sistem pemerintahan yang diterapkan kolonial.² Sebenarnya, kekuasaan bangsawan pada masa pemberontakan sudah hampir habis karena mereka mendapat serangan para pemberontak yang menentang kekuasaan mereka karena dianggap sebagai penguasa feodal dan penganut kepercayaan kafir. Banyak simbol kebesaran (*arajang*) dan istana yang dihancurkan, dan para *bissu* banyak dibunuh. Sementara itu, keluarga bangsawan yang banyak ditinggalkan pengikut dan kehilangan

² Rasionalisasi ini ditujukan untuk menghilangkan diskriminasi, dimana hanya bangsawan yang diberikan kekuasaan. Meskipun terdapat perbedaan dengan kekuasaan mereka sebelum tahun 1905, akan tetapi terdapat beberapa kemiripan. Situasi ini berlaku di Sulawesi Selatan hingga dibubarkannya negara Indonesia Timur. Saat itu, para bangsawan (*datu, arung, karaeng*) diberi kesempatan untuk memimpin bekas *onderafdeeling* yang diubah namanya menjadi swapraja wilayah 'otonom' yang dibagi menjadi Wanua, hingga tahun 1960.

sumber penghasilan tradisional mereka dan akhirnya mengungsi ke kota.

Secara formal, pada tahun 1960 pemerintah Indonesia mengeluarkan dekret yang membubarkan sisa-sisa sistem pemerintahan masa lampau di Sulawesi Selatan. Daerah swapraja diubah menjadi kabupaten yang dibagi lagi menjadi kecamatan, dan desa yang batas-batas wilayahnya ditentukan tanpa harus memperhatikan batas-batas wilayah tradisional sebelumnya. Banyak penguasa yang diberhentikan dan ada beberapa yang diangkat menjadi pejabat sementara di daerahnya.

Dengan demikian, berakhirlah sudah kekuasaan keturunan *to-manurung* yang sudah berlangsung berabad-abad yang mengubah struktur masyarakat Bugis dan Makassar menjadi struktur negara modern dan homogen. Sejalan dengan itu, tumbuh rasa kebangsaan sebagai warga negara Indonesia, disamping identitas ke-Bugisan mereka yang tetap sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari DI dan TKR, yang sekalipun memberontak, tetap tidak mempertanyakan identitas ke-indonesia-an mereka, tetapi hanya menuntut otonomi wilayah, bukan otonomi etnis mereka.

***Si'ri* dan *Pesse'*: Etos Hidup Orang Bugis dan Makassar**

Setiap masyarakat memiliki nilai budaya luhur sebagai proses pembelajaran yang diwariskan turun temurun, serta mempengaruhi pikiran dan pola hidup masyarakat bersangkutan. Demikian halnya dengan Suku Bugis yang memiliki falsafah *si'ri* dan *pesse'* atau *si'ri na pacce* pada Suku Makassar³. *Si'ri* arti kulturalnya adalah malu, yang erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan dan

harga diri sebagai manusia yang utuh. *Pesse'* dalam arti kultural adalah rasa belas kasihan, kepedihan, turut merasakan nestapa dan berhasrat membantu karena adanya hubungan rasa. *Pesse'* biasa disebut juga *perru* yaitu solidaritas yang tersembul dalam kalbu, bersifat solidaritas, yang diekspresikan dari jiwa manusia.

Pesse' menjadi jiwa, semangat dan pendorong tegaknya *si'ri* dan tidak terpisahkan sebagaimana ungkapan orang Makasar; *siri na pacce'* yaitu harkat martabat dan rasa pedih yang mendalam yang melahirkan adat yang mengatur watak, moral dan sikap hidup (*way of life*) orang Sulawesi Selatan. Mattulada memandang *si'ri* dan *pesse'* sebagai panggilan mendalam pada pribadi untuk mempertahankan nilai yang dijunjung tinggi; dihormati, dihargai, dicintai. Dengan kata lain, *si'ri* dan *pesse'* mempunyai arti esensial, baik bagi diri sebagai individu maupun bagi persekutuannya. Pentingnya *si'ri* dan *pesse'* diungkapkan La Toba, dalam Nasaruddin Koro (2006:31) "*siri'emmi ri-onroang ri-lino, utetong ri adeE, najagainnami siri'ta, teng ulesseri ada tongengku, pesse passikuwa, naia si'riE sunge naranreng nyawa na kira-kira*" yang artinya kurang lebih "karena *si'ri* kita hidup di dunia, aku berdiri di atas adat, untuk menjaga *si'ri* kita, saya tak akan ingkar dari janji dan kebenaran. *Pesse'* yang mendorong aku. Adapun *si'ri* dilingkari oleh semangat, dipaut oleh maut.

Sedangkan Hamzah Daeng Mangemba menguraikan bahwa *si'ri* – bukan sirik, mempercayai benda dan makhluk sebagai Tuhan -, melainkan

rasa malu yang erat hubungannya dengan: (1) kehormatan (*honour*), (2) harga diri (*high respect*), (3) harkat (*value*), (4) martabat (*dignity*) sebagai seorang manusia. Dengan kata lain dalam siri terkandung nilai pengenalan diri, instrospeksi, mawas diri, sedangkan *pesse'* adalah belas kasih, peri kemanusiaan (humanisme universal), rasa turut prihatin terhadap penderitaan orang lain, dan berhasrat membantu sebagai wujud solidaritas sosial.

Mengenai pentingnya *si'ri* ini terlihat dari beberapa ungkapan pada Suku Bugis, Makasar dan Suku Mandar yang berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai *si'ri* sama kedudukannya dengan hewan. Demi menegakkannya, apabila seseorang merasa dipermalukan dan tersinggung *si'ri*nya banyak orang yang lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan *si'ri*nya daripada hidup tanpa *si'ri*. Menurut orang Bugis dan Makasar, meninggal karena *si'ri* seperti mati diberi gula dan santan (*mate ri gollai, mate risantangi*) yang artinya mati untuk sesuatu yang berguna.

Nilai *si'ri* dan *pesse'* bisa disejajarkan dengan nilai-nilai yang dimiliki budaya Jepang seperti harga diri dan kehormatan, rasa solid yang kuat yang apabila dilanggar menimbulkan rasa malu yang luar biasa. Sedangkan dalam Islam *si'ri* dan *pesse'* seperti yang dikemukakan ulama besar HAMKA (Abu Hamid, *et al.*, 2007:22-23), bahwa *si'ri* atau menjaga harga diri itu sama artinya dengan menjaga syariat, yang dipandang dari ilmu akhlak adalah suatu kewajiban moral yang paling tinggi sehingga ada syair: "Jika tidak engkau pelihara hak dirimu, engkau meringankan dia, orang lain pun akan lebih meringankan, sebab itu hormatilah

³ Penjelasan tentang *si'ri* dan *pesse'* atau *si'ri na pacce* bisa dilihat dari beberapa ahli, seperti Nasaruddin Koro 2005, Pelras (2006).

dirimu dan jika suatu negeri sempit buat dia, pilih tempat lain yang lebih lapang.” HAMKA mensejajarkan *si’ri* dengan “pantang” pada masyarakat Sumatera Barat. Lebih lanjut HAMKA berpendapat bahwa *si’ri* menimbulkan tawadhu’ dan perangai terpuji mahaudhah yang terdiri atas: (a) sabar, yaitu dapat mengendalikan diri ketika sedang marah, (b) *iffah*, yaitu dapat menahan hawa nafsu ketika hendak didorongkan, (c) *syaja’ah*, yaitu berani karena benar dan yakin serta sanggup mempertahankan dimana saja, (d) adil yaitu pertengahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana diungkapkan Abu Hamid (2007:7), nilai budaya *si’ri* dan *pesse’* dewasa ini sudah mengalami pergeseran, bukannya dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreatifitas untuk merasa malu kalau berbuat salah atau tidak melakukan ketentuan yang berlaku, dan mengkhianati janji serta disiplinnya, melainkan ditarik lebih sempit pada ketersinggungan rasa harga diri dan martabat keluarga serta asal keturunannya. Dalam hal seperti ini, nilai *si’ri* dan *pesse’* hanya berguna untuk mencari gengsi-gengsi sosial atau terpendang yang berguna bagi lingkungan keluarga. Di lain pihak agak sulit dibayangkan untuk hadirnya pribadi yang berkualitas tinggi, jika etos kerja selalu dihubungkan dengan harga diri dan mmartabat semata, tanpa dibarengi pandangan (*world view*) yang menilai tingi karya dan hasil karya atau prestasi.

Dinamika Orang Bugis dan Makassar: Proses Pergulatan Menuju Kesejahteraan

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal tersebut, catatan kesejarahan Indonesia memberikan keterangan kepada kita bahwa perwujudan kesejahteraan tidak semuda sebagaimana yang dipikirkan. Melainkan melalui proses pergulatan yang panjang sehingga dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Sehubungan dengan itu, pergulatan menuju kesejahteraan di Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui beberapa kasus atau kejadian yang kontekstual, seperti berlangsungnya pertarungan antar elit Bugis dan Makassar, migrasi keluar Sulawesi Selatan, dan pemberontakan DI/TII sebagai manifestasi atas ketidakberhasilan atau kegagalan negara mengelola keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Penjelasan kasus sesuai dengan konteks Sulawesi Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kasus 1. Pertarungan Antar Elit Bugis dan Makassar

Dari beragam sumber, keberadaannya elit di Indonesia dibentuk melalui empat panggung⁴, yakni: (1) kelompok elit tradisional yang lahir dari keberadaan mereka sebagai

⁴ Mengutip Saint Simon, Keller (1984) membagi sumber atau panggung pembentukan elit secara umum bersumber dari kelompok; (i) mereka yang menduduki garis atau eksekutif, dan yang menjalankan suatu fungsi pengintegrasian, dengan mengambil tujuan-tujuan yang akan diperjuangkan oleh masyarakat bersangkutan; (ii) mereka yang menyediakan pengetahuan atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan ini, staf teknis atau golongan professional; (iii) mereka yang menjalankan fungsi intelektual. Sedangkan Batzell, yang dikutip Keller (1984), mengklasifikasi proses pembentukan elit melalui enam pintu; (i) bisnis; (ii) opini dan politik; (iii) dokter dan arsitek; (iv) gereja dan pendidikan; (v) para artis dan pengarang; (vi) aneka ragam jabatan.

kelompok sosial yang memiliki hak-hak istimewa terhadap politik, ekonomi dan kebudayaan, karena kedudukannya sebagai golongan priyayi. Dalam perjalanannya kelompok ini adalah kelompok yang pertama yang merespon regulasi rezim (politik liberal dan politik etis) yang ditawarkan pemerintah Belanda melalui pembaharuan sistem politik, ekonomi dan budaya, dengan menjadikan arena pendidikan modern, sebagai pintu masuknya.

Patut dicatat, tidak semua kelompok ini merespon regulasi rezim, bahkan kebanyakan diantara mereka cenderung melawan pembaharuan yang terjadi, akan tetapi dari kelompok elit inilah (dalam jumlah terbatas) yang pertamakali merespon gagasan ini; (2) elit yang dilahirkan dari rahim pendidikan modern. Kelompok ini merupakan campuran dari kalangan priyayi tingkat tinggi, rendah dan masyarakat biasa yang memiliki akses dengan tokoh-tokoh Politik Etis. Meskipun kelompok elit ini adalah sebagian besar bersumber dari kalangan elit tradisional (priyayi), akan tetapi perilaku politik, budaya dan ekonomi mereka tidak menggambarkan sebagai elit tradisional; (3) pergerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok elit yang telah menempuh pendidikan modern, yang disponsori oleh pedagang-pedagang senior, yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan colonial, menyeret aktivis-aktivis pergerakan menduduki posisi elit baru.

Adapun panggung utama kelompok ini adalah organisasi-organisasi sosial modern, seperti: Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah dan Jamiyatul Khair. Kelompok ini berhasil membentuk elit-elit baru yang sama sekali bersumber dari kalangan non-priyayi, pada setiap

level, sampai di tingkat pedesaan; dan (4) kelompok elit yang bersumber dari kekuatan ekonomi, etnis dan agama. Pembentukan sejumlah organisasi dengan menggunakan citra agama, sebagai upaya kelompok ini merebut posisi-posisi strategis, baik politik maupun ekonomi. Kelahiran Serikat Islam misalnya, adalah reaksi dari kelompok elit tradisional yang gerah dengan pembaharuan yang dicanangkan oleh Politik Etis. Sama halnya dengan kehadiran Jamiyatul Khair yang digagas oleh pedagang-pedagang keturunan Arab dan Minang, untuk menghadang laju ekonomi pedagang Cina. Pada golongan lain (Kristen) merespon kondisi ini dengan semangat yang sama, yakni mengembangkan program kristenisasi.

Sehubungan dengan kesejarahan Sulawesi Selatan, pembentukan elit di dua etnis telah bergeser dari kelompok elit tradisional ke kelompok elit yang lahir dari pendidikan modern dan kekuatan ekonomi, agama dan etnis. Meski demikian, hal yang menarik sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini adalah pertarungan antar elit pada dua etnis besar (Bugis dan Makassar) di Sulawesi Selatan.

Pertarungan yang dimaknai konflik elit di Sulawesi Selatan diawali dengan semacam dialektika sosial yang ditandai dengan adanya perputaran elit. Marie Kolabinska dalam Bottomore (1966) menjelaskan gejala ini dengan memetakan jenis perputaran elit, menjadi beberapa tipe, yakni: (1) perputaran yang terjadi antara kategori-kategori elit yang tengah berkuasa; dan (2) perputaran antara elit dan populasi selain elit, yang dapat terjadi dalam dua bentuk: (a) individu-individu dari strata bawah berhasil dalam memasuki elit yang ada, atau (b) individu-individu dalam

strata bawah bisa membentuk kelompok elit baru yang kemudian terlibat perebutan kekuasaan dengan elit yang ada.

Perputaran elit yang kemudian menjelma menjadi konflik elit yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam proses merebut kekuasaan politik dan ekonominya, cenderung mengikuti pemetaan Kolabinska, yakni perputaran antara elit yang berkuasa, dan pada saat yang bersamaan terjadi pembentukan elit-elit baru pada kelompok sosial bawah, melalui sistem patron-klien.

Meski di Sulawesi Selatan dikenal adanya struktur sosial yang sangat tajam, kelompok sosial berdarah putih (pemimpin) dan masyarakat berdarah merah (pengikut), namun tidak dapat semata-mata mencerminkan kelas sosial yang mencerminkan kelas bawah dan atas yang saling berhadapan (borjuasi-proletar) sebagaimana digambarkan oleh Marx. Melainkan perbedaan itu lebih merupakan sebagai alat penjelas antara pemimpin dan

pengikut yang saling terintegrasikan secara sosial, politik dan ekonomi, realitas ini oleh Ahimsa disebutnya sebagai hubungan *patron-klien*⁵ secara politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan sosial, politik dan ekonomi mereka sangat lunak (*soft relationship*), nyaris tidak berstruktur.

Dengan mengikuti model perputaran elitnya, struktur sosial dan pola hubungan sosial di Sulawesi Selatan, maka bentuk konflik yang sesungguhnya terjadi lebih merupakan konflik antar elit yang memanfaatkan basis etnis. Berbagai kuasi kelompok yang terbentuk, dan memiliki elit baru selalu berusaha mengarahkan kelompoknya pada etnis tertentu, sebagai modal kekuatan. Dalam kondisi ini, elit menggunakan etnis sebagai *capital of power*.

Kuasi kelompok yang terbentuk seperti ini, menurut Evers & Chiel (1990) adalah cikal bakal sebagai kelompok strategis, karena secara strategis pula mereka mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, ekonomi, sosial, situasi konflik, reformasi atau revolusi pada masyarakat masing-masing. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-pemimpin yang dianggapnya mewakili keinginan-keinginannya. Dengan demikian, kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan *pressure group* bagi yang berkuasa.

Konflik elit antar kelompok strategis yang berbasiskan etnis seperti yang diduga terjadi di Sulawesi Selatan, didorong oleh hal-hal sebagai berikut: (1) elit dan kelompok strategisnya ingin mendapat apa yang disebut Scot (1968)

⁵ Hubungan patron-klien dikalangan orang Bugis dapat dilihat pada pandangan mereka tentang konsep *Ajjoareng* dan *joa'*. *Ajjoa'raeng* menurut mereka adalah orang yang menjadi ikatan atau panutan dan ini bisa seorang *punggawa*, *aru* ataupun pemuka masyarakat lainnya. Pendeknya dia merupakan tokoh pemimpin, yang menjadi sumbu kegiatan orang-orang disekitarnya, yang mengikuti kemauan serta kehendaknya dengan patuh. Pengikut-pengikut ini mereka sebut *joa'* dan mereka berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) yang setia. Seseorang yang merasa dirinya *joa'* dari seorang *Ajjoareng* akan selalu berusaha menunjukkan kesetiannya tersebut dalam keadaan apapun, dan kapan pun *Ajjoareng* memerlukannya (Mattulada, t.t: 463-464). Walaupun demikian kesetiaan tersebut juga bukannya tanpa syarat. Mereka hanya tetap setia selama *Ajjoarengnya* tetap bersungguh-sungguh atau betul-betul menjaga dan menghargai *siri*" mereka (Mattulada, t.t:467).

sebagai *constant pie orientation*, yaitu semacam tuntutan untuk memperbesar *kue* dan penguasaan *kue* yang semakin besar (resources orientation); dan (2) setelah terbentuknya kelompok strategis, dan diikuti oleh kemunculan elit, maka tercipta apa yang disebut oleh Dahrendorf sebagai posisi dan otoritas. Untuk memperluas otoritas, maka elit akan terus berusaha memperkuat dan mempertahankan posisinya, melalui konflik sekalipun. Oleh karena itu, konflik elit yang berbasiskan etnis di Sulawesi Selatan bukanlah konflik antar kelas atas dan bawah seperti yang dirumuskan oleh Marx, atau, konflik yang dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas kelompok yang mulai melonggar seperti yang diuraikan oleh Coser.

Kasus 2. Arus Migrasi Keluar Sulawesi Selatan

Dua etnis Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) sudah sejak lama dikenal sebagai Bangsa perantau, mereka tersebar di berbagai penjuru Nusantara, bahkan sampai ke negeri tetangga, seperti: Singapura, Malaysia, dan Australia bagian Utara. Hal ini sejalan dengan filosofi orang Bugis tentang migrasi berbunyi "*kegisi monro sore' lopia', kositu tomallabu se'ngereng*" yang artinya: "di manalah perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan".

Orang Bugis mulai bermigrasi pada awal abad XVII dengan alasan bukan semata-mata oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi, antara lain tidak adanya ketentraman jiwa, karena peperangan, kehilangan kemerdekaan, dan juga karena filosofis yang dipegang, khususnya Bugis Wajo yang tertuang dalam ungkapan: "*Maradeka to-Wajo'e ade'mi*

napopuwang" yang artinya kurang lebih: "Rakyat Wajo itu merdeka hanya hukumlah yang dipertuan" (Kesuma, 2004). Atau dengan bahasa lain, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum tidak bisa ditegakkan, maka orang Bugis dan Makassar akan bermigrasi meninggalkan daerahnya menuju daerah bahkan negara lain. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk protes terhadap bentuk kezaliman rezim yang berkuasa.

Bagi orang Bugis, bermigrasi atau merantau pada umumnya berhubungan dengan upaya mencari pemecahan konflik pribadi, menghindari penghinaan, kondisi yang tidak aman, atau keinginan untuk melepaskan diri baik dari kondisi sosial yang tidak memuaskan, maupun hal-hal yang tidak diinginkan akibat tindak kekerasan yang dilakukan di tempat asal (Pelras, 2006).⁶ Dalam sejarah tercatat bahwa pada akhir abad ke-18, pemukiman orang Bugis sudah ada di berbagai tempat di Sulawesi Selatan, di Bengkulu, di Kepulauan Riau bahkan banyak yang memegang posisi berpengaruh di Kesultanan Riau-Johor.

Di semenanjung Melayu, mereka menguasai ekspor timah dan produk hutan. Di Pontianak dan Mempawah mereka menguasai perdagangan. Di wilayah bagian Tenggara Kalimantan, pemukiman orang Bugis terdapat di Pulau Laut, pesisir Kalimantan Timur, khususnya Pegatan, Pasir, Kutai, Samarinda, Bulungan, dan Gunung Tabur, orang Bugis menguasai perdagangan di hulu sungai. Di seberang tempat itu, yakni di bagian Barat Sulawesi Tengah, banyak pemukiman

⁶ Cristian pelras. Manusia Bugis. Penerbit Nalar: Forum Jakarta-Paris. Ecole française d'Extreme-Orient. Jakarta, 2006

orang Bugis yang sejak berabad-abad ditemukan di sekitar Teluk Palu khususnya di Donggala, Banawa, dan Kaili.

Selain itu, kantong-katong pemukiman orang Bugis ditemukan di Sumbawa, Ende, Flores di Pulau Jawa terdapat di Surabaya, Gresik, dan Batavia (Jakarta saat ini), serta di sebagian kecil di Delta Sungai Indragiri dan Jambi, Pantai barat Johor di Tanah Melayu, di Sabah, kawasan Lindu di Sulawesi tengah semenanjung Tenggara Sulawesi. Selanjutnya Pelras menjelaskan bahwa sesudah dekade 1970-an, makin banyak perantau Bugis yang pergi mencari "rejek halal" di Irian, Maluku dan Timor Timur (ketika terintegrasi dengan Indonesia).

Para perantau Bugis menguasai berbagai sektor ekonomi, di Samarinda Kalimantan Timur mereka menguasai perdagangan antara lain memonopoli impor beras, garam, rempah-rempah, kopi, tembakau dan kebutuhan pokok lainnya, bahkan mereka memasuki sektor politik dan pemerintahan. Sementara perantau yang lebih berorientasi tanaman keras pada periode 1885 dan 1920 di wilayah Johor, Tanah Melayu menanam kelapa yang lebih cepat menghasilkan, sementara para pendatang dari Pulau Jawa lebih tertarik menanam karet. Pada umumnya, orang Bugis yang berada di Johor berasal dari daerah sekitar Danau Tempe, sebagian berasal dari Sidenreng, dari Batu-batu, bagian Utara Soppeng akan tetapi lebih banyak yang berasal dari Wajo.

Naluri berdagang orang Bugis di perantauan terlihat dari upaya untuk menjadi pengimpor beras untuk kebutuhan pokok mereka akibat tanah-tanah mereka sudah ditanami kelapa dan tidak menghasilkan padi lagi. Selain

menanam kelapa, padi pada sawah pasang surut di Johor, Kalimantan dan Sumatera, mereka juga membuka perkebunan nanas yang tampaknya lebih menguntungkan ditanam di atas lahan gambut yang baru dibuka (Abu Hamid, dalam Pelras, 2006: 376). Selanjutnya Pelras menjelaskan bahwa para perantau Bugis di tanah Melayu dan Sumatera bukan sekedar petani tradisional, akan tetapi pengusaha berorientasi ekonomi⁷. Orang Bugis di Wilayah Timur Sumatra, misalnya. Berbeda dengan orang Jawa di sekitar mereka yang memiliki konsep keberhasilan yang diukur berdasarkan kemampuan memperluas sawah atau kebun guna mengintensifkan dan meningkatkan produk pertanian di kawasan itu, sedangkan para petani Bugis lebih berpikir jauh ke depan, mereka lebih suka menginvestasikan kembali uang dalam bidang transportasi atau perniagaan, atau menyewakan lahan mereka kepada petani Jawa atau orang Bugis yang baru tiba, dan selanjutnya mencari tempat yang lebih menguntungkan.⁸

Sedangkan migran Bugis yang bermukim di daerah Lindu, Sulawesi Tengah yang sudah lama mendiami daerah tersebut, mereka hanya terkonsentrasi pada wilayah dekat laut, baik pada perkampungan pesisir, maupun pada kerajaan-kerajaan kecil Bugis di sekitar Pantai Palu-meskipun ada pula yang sesekali mengunjungi daerah pedalaman untuk berdagang. Pemukiman di daerah Pegunungan Lindu baru dibuka pada tahun 1957 oleh para pendatang dari Sulawesi selatan untuk menghindari kekacauan akibat pemberontakan Kahar Muzakar.

⁷ Christian Pelras, 2006: 376

⁸ Tanaka, dalam Pelras, 2006: 376

Mereka menjadi penangkap ikan di Danau Lindu. Jauh sesudahnya, orang Bugis juga membuka warung di Donggala, setelah pemberontakan Kahar Muzakar usai, banyak pendatang yang membuka kios di pasar-pasar, berusaha di bidang perikanan, menjadi pialang tanah, atau pedagang beras⁹.

Menurut Acciaioli, bagi orang Bugis, istilah merantau itu menyiratkan “lebih dari sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga suatu upaya untuk mencari pengetahuan sekaligus kekayaan, yang mencakup pula upaya untuk memperbaiki nasib. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu cara menangani nasib diri sendiri, yang mencerminkan pandangan mereka yang rumit mengenai hubungan antara tabiat pribadi dan takdir, sekaligus mencerminkan pandangan hidup orang biasa yang berbeda dengan sikap bangsawan yang selalu mendasarkan penilaian (terhadap sesama manusia) secara hierarkhis berdasarkan keturunan”¹⁰.

Demikian halnya dengan Suku Makasar, Pelras¹¹ menyebutnya sebagai “sejarah cemerlang suatu suku bangsa dari timur” yang meninggalkan kampung halaman, merantau jauh ke negeri orang. Mereka menyeberang ke negara Singapura, Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan jauh ke Perancis. Beberapa literatur menyebutkan bahwa gelombang perpindahan Suku Bugis-Makasar terutama terjadi pada abad ke XVII terutama ke Banteng (Jawa) dan negeri Melayu berlangsung ketika Sultan

Hasanuddin terpaksa takluk kepada Belanda dengan ditanda tangannya perjanjian Bongaya. Ribuan kepala keluarga meninggalkan tanah tumpah darahnya hanya untuk menghindari pertemuan dengan Belanda. Saat ini, suku bangsa Bugis merupakan etnik yang banyak mendiami berbagai wilayah di tanah air. Mereka memasuki berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek tradisional-ekstraktif seperti pertanian, nelayan, perkebunan sampai perdagangan (terutama pelayaran antar pulau bahkan mancanegara) dan jasa, pemerintahan, politik-kenegaraan.

Kasus 3. Pemberontakan DI/TII

Kejadian pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari dua hal, yakni *pertama*, manifestasi politik identitas yang bersejarah di Indonesia; dan *kedua*, adanya indikasi ketidakpuasan yang dialami oleh orang-orang daerah terhadap pemerintah pusat.

Menjadi penting untuk dikemukakan sehubungan dengan yang pertama adalah Islam sebagai agama sekaligus tatanan sosial merupakan kekuatan yang dianggap berbahaya.¹² Meski argumentasi Snouck dapat menenangkan “ketakutan” Pemerintah Belanda terhadap Islam, akan tetapi gerakan dalam bentuk pemberontakan terhadap Belanda tak dapat terelakkan. Berdirinya berbagai organisasi sosial-politik diawal-awal tahun 1910-an dan 1920-an (seperti: *Indische Partij*, Sarekat Islam, Muhammadiyah,

⁹ Acciaioli, 1958 dalam Pelras, 2006: 377)

¹⁰ Lihat Pelras, 2006: 377

¹¹ Lihat A. Shadiq kawu. 2007. Kisah-Kisah Bijak Oang Sulawesi Selatan 2. Makasar: REFLKSI

¹² Pernyataan ini sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Harry J. Benda (1980) dalam bukunya yang berjudul “Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Kependudukan Jepang” diterbitkan oleh Pustaka Jaya.

Nadhatul Ulama, dan lain-lain) sebagai upaya politik asosiasi Pemerintah Belanda ternyata tidak mampu meredam semangat perjuangan yang dibangun berdasarkan identitas masing-masing organisasi sosial-politik tersebut.

Upaya Snouck untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih modern¹³, dimana bukan Indonesia Islam dalam kenyataannya sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini malah menguntungkan Indonesia, dimana pendidikan yang dijadikan sebagai media awal ternyata memberikan kesadaran akan pentingnya emansipasi berbangsa (Benda, 1980). Tidak hanya itu saja, dikotomi Islam Religi dan Islam Politik yang dikemukakan oleh Snouck malah membuka “jebakan” bagi Pemerintah Belanda sendiri. Inilah yang kemudian disoroti oleh Wertheim bahwa pendikotomian yang dilakukan oleh Snouck, malah mengaburkan posisi dan peran kepemimpinan lokal (kiai dan ulama) yang ada di pedesaan Jawa. Secara utuh Wertheim mengemukakan:

“...adalah perkembangan kemudian ini yang membuka matanya untuk melihat arti yang sangat penting dari kiai dan ulama sebagai tokoh-tokoh inti di daerah pedesaan Jawa...” (Wertheim dalam Benda, 1980; 9).

Dengan demikian, Islam sebagai identitas dalam membangun gerakan

politik pada Pemerintahan Belanda tidak dapat dipisahkan dalam konteks kejadian-kejadian pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan masyarakat pedesaan di Jawa saat itu.

Hal yang sama dialami oleh Jepang ketika menggantikan Belanda sebagai penjajah baru di Indonesia. Meski politik *divide it impera* berhasil dilakukan oleh Jepang, akan tetapi tetap saja merasa ketakutan terhadap segala bentuk gerakan politik yang dibangun dari identitas Islam (Benda, 1980). Dengan kebijakan yang mirip dilakukan oleh Belanda, Jepang memberikan keluwesan bagi para pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia, termasuk mempertahankan berdirinya Masyumi sebagai kekuatan politik mereka yang beridentitas Muslim. Namun tetap saja menyisahkan beragam persoalan hingga saat ini, diantaranya pertentangan antar elit yang saling berbeda latar belakang identitasnya, yakni elit priyayi, elit nasionalis, dan elit Islam.

Setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia (tahun 1945), pertarungan politik identitas kembali mencuat. Saat itu, pertarungan bukan lagi terjadi antara Indonesia dengan kolonial, melainkan pertarungan identitas sesama orang Indonesia. Hal ini kemudian membuktikan bahwa politik “pecah belah” atau *divide it impera* Jepang menunjukkan kemampuannya untuk membenturkan antar identitas yang melekat pada wajah elit negara ini.

Hal yang tak kalah menariknya ketika berbicara tentang politik identitas setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kepemimpinan Soekarno sebagai elit nasionalis semakin memperuncing munculnya polarisasi antar identitas di

¹³ Indonesia modern menurut Snouck adalah Indonesia yang diperbarat, dimana peradaban Belanda haruslah menggantikan peradaban tradisional priyayi dan di atas semuanya adalah peradaban santri. Untuk itu, Snouck menawarkan strategi asosiasi, yakni suatu upaya untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara Timur dan Barat. Konsep sekaligus strategi asosiasi ini, kemudian melahirkan kebijakan politik etis yang diberlakukan oleh Belanda (Benda, 1980).

tanah air. Janji-janji yang tidak ditepati Soekarno sebagai kepala negara, kemudian mendorong terjadinya pemberontakan yang dimotori oleh gerakan politik berbasis identitas di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu dari pemberontakan berbasis identitas tersebut adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan.¹⁴

Setidaknya kehadiran DI di bawah pemimpin kharismatik Kahar Muzakkar, membuat struktur kekuasaan pusat (Soekarno) mengalami tantangan. Pemberontakan dengan motif etnis, regional, dan keagamaan yang dilakukan oleh DI ternyata mengundang perhatian yang serius bagi pemerintahan Orde Lama. Walau memakan waktu 15 tahun lamanya (1950 – 1965), DI di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah.¹⁵

Selanjutnya, apakah gerakan politik identitas terutama identitas yang berbasis religi berhenti sampai disitu saja? Dari berbagai sumber dan menurut analisis penulis bahwa gerakan politik identitas tersebut, tidak akan pernah surut sepanjang negara ini berdiri, meski dapat di atasi oleh rezim yang berkuasa. Bahkan hingga saat ini,

¹⁴ Patut dicatat, bahwa selain DI/TII sebagai gerakan politik berbasis identitas Islam, juga terdapat beberapa gerakan politik berbasis religi lainnya yang berupaya melakukan pemberontakan, antara lain: RMS, PERMESTA, dan lain-lain.

¹⁵ Hal yang sama juga terjadi bagi gerakan politik berbasis identitas religi. Dengan sikap pemerintah yang cenderung agresif terhadap kelompok/organisasi separatis, berbagai organisasi politik identitas mengalami hal yang sama dengan DI. Walau demikian, ternyata politik identitas tetap hidup dan bagaikan “api dalam sekam” yang siap menyala dikemudian hari.

mereka yang pernah terlibat dalam aktivitas “organisasi separatis” malah tampil sebagai pemimpin alternatif masyarakat yang diharapkan dapat membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

Penutup

Sejarah panjang Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan diwarnai dengan berbagai gejolak seperti pertarungan elite politik lokal yang dikemas dengan pertarungan antar etnis Bugis-Makassar, *pasompe* atau migrasi untuk mencari daerah baru untuk menegakkan nilai budaya *siri dan pesse*, serta munculnya pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakar yang kesemuanya itu sejatinya bermuara kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan pada tataran keluarga, komunitas dan rakyat Sulawesi Selatan keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. Penerbit : INNINAWA. Makassar
- Andi, Zaenal Abidin. 1999. Capita Selecta Sejarah Sulawesi selatan. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Andi, Zaenal Abidin. 1999. Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan. Ujungpandang; Hasanuddin University Press
- Christian, Pelras. 2006. Manusia Bugis. Penerbit : Nalar. Forum Jakarta-Paris. Ecole Francaise d’Extreme-Orient. Jakarta
- Heddy Sri Ahimsa-Putra. 2007. Patron dan Klien Di Sulawesi Selatan. Sebuah Kajian Fungsional-

- Struktural. Yogyakarta: KEPPEL Press
- Koo, Nasaruddin. 2006. *Ayam jantan tanah daeng. Siri' dan Pesse, dari konflik lokal ke pertarungan lintas batas*. Jakarta: Ajuara La Side.
2006. Arung PIKK. Sang pembebas. Penerjemah: HA. Ahmad Saransi. Makassar; Yayasan Baruga Nusantara
- Poelinggomang. Edward, L. 2002. Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan
- Perdagangan Maritim. Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta
- Rahman, Nurhayati, et al (editor) 2003. La Galigo. Menelusuri Warisan Sastra Dunia. Makassar: Pusat Studi La galigo. Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora. Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
- Sutherland, Heather. dkk. 2004. Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Penerbit: Ombak. Yogyakarta
- Wahid, Sugira. Manusia Makassar. 2007. Makassar: Pustaka Refleksi